

EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM

(Studi Kasus di Wilayah Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor)

Disusun Oleh:

NAMA : MUHAMMAD DIMAS TRI RAHARJO
NPM : 2241021032
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK

Tesis diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar

Magister Terapan Administrasi Publik (M.Tr.AP)



**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA
PROGRAM MAGISTER TERAPAN
TAHUN 2026**

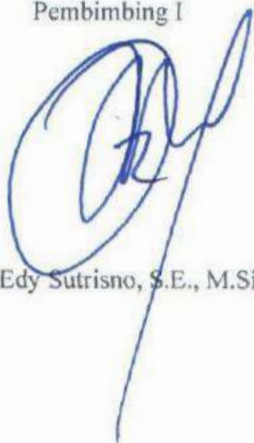
**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS

Nama : Muhammad Dimas Tri Raharjo
NPM : 2241021032
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tesis : Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Studi Kasus di Wilayah Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor)
Tesis Title : Evaluation of the Utilization of Village Funds in Alleviating Extreme Poverty (A Case Study in Cileuksa Village, Sukajaya District, Bogor Regency)

Diterima dan disetujui untuk dipertahankan Pembimbing Tesis.

Pembimbing I



(Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si)

Pembimbing II



(Dr. Mala Sondang Silitonga, MA.)

**PROGRAM STUDI APN MAGISTER TERAPAN
POLITEKNIK STIA LAN JAKARTA**

LEMBAR PENGESAHAN

NAMA : MUHAMMAD DIMAS TRI RAHARJO
NPM : 2241021032
JURUSAN : ADMINISTRASI PUBLIK
PROGRAM STUDI : ADMINISTRASI PEMBANGUNAN NEGARA
KONSENTRASI : MANAJEMEN KEBIJAKAN PUBLIK
JUDUL TESIS : EVALUASI PEMANFAATAN DANA DESA DALAM
PENANGGULANGAN KEMISKINAN EKSTREM
(SUDI KASUS DI WILAYAH DESA CILEUKSA,
KECAMATAN SUKAJAYA, KABUPATEN BOGOR)

Telah mempertahankan tesis di hadapan penguji tesis Program Magister Terapan
Adminsitasi Pembangunan Negara, Politeknik STIA LAN Jakarta,
Lembaga Administrasi Negara, pada:

Hari : Selasa
Tanggal : 23 JUNI 2026
Pukul : 09.00 WIB

TELAH DINYATAKAN LULUS

PENGUJI TESIS:

Ketua Sidang : Dr. Firman Hadi Rivai, MPA
Sekretaris : Dr. Hidayaturahmi, MPA
Anggota : Dr. Hamka, MA
Pembimbing 1 : Dr. Edy Sutrisno, S.E., M.Si.
Pembimbing 2 : Dr. Mala Sondang Silitonga, MA



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Muhammad Dimas Tri Raharjo
NPM : 2241021032
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

Dengan ini menyatakan bahwa, tesis yang sudah saya susun merupakan karya saya sendiri dan benar keasliannya. Apabila dikemudian hari hasil penelitian tesis ini merupakan hasil plagiat atau menjiplak karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib di Politeknik STIA LAN Jakarta.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar dan tidak ada paksaan.

Jakarta, Juni 2026



Muhammad Dimas Tri Raharjo

KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Waa Ta'ala atas segala Rahmat dan Karunianya kepada Penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis yang berjudul “Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem” bertempat di wilayah Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor.

Ketertarikan saya selaku penulis sekaligus peneliti dalam membedah persoalan ini dilatarbelakangi keresahan terhadap persoalan kemiskinan khususnya kemiskinan yang tidak kunjung usai di tengah banyaknya berbagai kebijakan regulasi, dan kajian yang dilakukan sebagai upaya dalam menyelesaikan persoalan pengentasan kemiskinan khususnya bagi masyarakat yang mengalami kemiskinan kronis (miskin ekstrem). Wilayah Bogor sebagai wilayah Peri-Urban diperoleh bukan semata-mata akibat subjektivitas peneliti dalam menentukan lokasi penelitian namun dilatarbelakangi dasar penetapan lokus yang kuat berbasis data yang tentu dapat dipertanggung jawabkan. Oleh karena itu saya berharap melalui tesis ini dapat menjadi bahan masukan, rekomendasi kebijakan dan berbagi pandangan serta sebagai bahan proses pembelajaran bagi seluruh elemen yang berkepentingan.

Selama proses penulisan tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diberikan dan diterima kepada saya selaku penulis dari berbagai pihak, oleh karena nya izin kan saya menyampaikan ucapan terima kasih kepada Bapak Dr. Edy Sutrisno, S.E, M.Si selaku dosen pembimbing satu dan Ibu Dr. Mala Sondang Silitonga, M.A. selaku dosen pembimbing dua yang selalu memberikan semangat, dan percaya bahwa saya mampu menyelesaikan penelitian ini, beliau juga selalu memberikan bimbingan, tambahan ilmu serta pengarahan mengenai penulisan tesis. Ucapan terima kasih juga saya ucapkan kepada Bapak Dr. Firman Hadi Rivai, MPA dan Ibu Dr. Hidayaturhami, MPA selaku dosen pembahas dalam penyusunan tesis ini, tanpa masukan beliau berdua kiranya penelitian saya tidak dapat banyak memberikan sudut pandang dan wawasan dalam hal penulisan pada tesis ini.

Penulisan tesis ini juga tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak, oleh karenanya izinkan saya juga mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Drs. Bambang Sukotjo dan Ibu Malaningsih (Ayah dan Ibu) yang selalu memberikan semangat dan do'a yang tidak kenal Lelah;
2. Wargina Arifriyani (istri) dan Giandra Prawiroharjo (anak) yang selalu memberikan dukungan, pengertian dan do'a nya;
3. Kak Pradina yang selalu memberikan dukungan semangat bagi saya dan percaya bahwa saya dapat menyelesaikan penelitian ini;
4. Seluruh rekan-tekan Magister Terapan Angkatan 2022 yang selalu memberikan dukungan kepada saya untuk dapat menyelesaikan penelitian tesis ini;

5. Seluruh pegawai pada Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan yang telah memperkenalkan saya dalam melakukan penelitian mengenai Dana Desa;
6. Al-Mubarak rekan saya selaku ASN di Kementerian Desa dan PDT Ditjen PDP yang bersedia dan berkenan menjadi narasumber wawancara penelitian;
7. Para Narasumber penelitian yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, melalui data dan informasi yang lengkap dari Bapak/Ibu kiranya penelitian ini tidak dapat terentaskan secara baik.
8. Seluruh pegawai Bagian Administrasi dan Akademik Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran studi saya;

Saya menyadari bahwa dalam penyusunan penelitian ini masih banyak kekurangan baik dari sistematika penulisan, susunan kalimat serta tata penggunaan bahasa yang baik dan benar, sehingga saya menerima secara terbuka atas segala saran dan kritik mengenai penulisan maupun isi dari penelitian yang saya lakukan.

Akhir kata saya selaku penulis memohonkan maaf yang sebesar-besarnya atas segala kesalahan dan kekhilafan baik yang secara sengaja maupun yang tidak disengaja, mudah-mudahan hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi Instansi Pemerintah yang berkepentingan, serta mudah-mudahan melalui hasil penelitian ini dapat menjadi referensi pertimbangan dalam perumusan hingga penetapan kebijakan pengentasan atau penanganan kemiskinan ekstrem. Besar harapan saya agar kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem dapat terentaskan, dan stigma “paradoks Bogor” dapat terhapuskan sehingga Indonesia menuju masyarakat yang madani.

Jakarta, Juni 2026
Peneliti

Muhammad Dimas Tri Raharjo

ABSTRAK

Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem

(Studi Kasus di Wilayah Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor)

Muhammad Dimas Tri Raharjo

2241021032@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Pencapaian target nol persen kemiskinan ekstrem nasional pada akhir 2024 masih menghadapi kendala regulasi dan implementasi. Fenomena ini tercermin di Desa Cileuksa, Kabupaten Bogor, yang terjebak dalam "Paradoks Bogor" berupa bertahannya kantong kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi daerah. Penelitian ini bertujuan mengevaluasi efektivitas BLT-Dana Desa terhadap konsumsi Kelompok Penerima Manfaat (KPM) kemiskinan ekstrem, serta membedah faktor struktural penyebab perangkap kemiskinan tersebut. Secara metodologis penelitian menggunakan pendekatan campuran (*mixed methods*) dengan desain Sekuensial Eksplanatoris. Fase kuantitatif menguji data sekunder melalui analisis regresi linear. Fase kualitatif mendalami konteks implementasi melalui wawancara dan observasi berdasarkan model kebijakan publik Merilee S. Grindle dan Martin Ravallion, yang divalidasi menggunakan teknik triangulasi data. Hasil analisis kuantitatif menunjukkan BLT-Dana Desa tidak dapat menjelaskan variabilitas konsumsi antar-rumah tangga karena nominal bantuan yang seragam, meski secara riil tetap krusial sebagai bantalan ekonomi dasar. Sementara itu, analisis kualitatif membuktikan keberadaan perangkap kemiskinan geografis (*geographic poverty trap*). Dana bantuan habis untuk konsumsi jangka pendek akibat rendahnya produktivitas modal yang tertekan oleh isolasi fisik, kerentanan ekologis pasca-bencana, serta lemahnya tata kelola pembersihan data penargetan di tingkat pemerintahan desa. Kesimpulan menunjukkan BLT-Dana Desa efektif sebagai jaring pengaman instan, namun gagal menggraduasi KPM secara struktural. Rekomendasi yang dimungkinkan berupa reformulasi Alokasi Dana Desa yang adaptif serta transformasi skema bantuan menuju pemberdayaan ekonomi produktif berbasis karakteristik wilayah.

Kata Kunci: Dana Desa, Kemiskinan Ekstrem, Paradoks Bogor, *Sequential Explanatory Mixed Method*.

ABSTRACT

Evaluation of the Utilization of Village Funds in Alleviating Extreme Poverty

(A Case Study in Cileuksa Village, Sukajaya District, Bogor Regency)

Muhammad Dimas Tri Raharjo

2241021032@stialan.ac.id

Politeknik STIA LAN Jakarta

Achieving the national target of zero-percent extreme poverty by the end of 2024 faces persistent regulatory and implementation hurdles. This phenomenon reflected in Cileuksa Village, Bogor Regency, which remains trapped within the "Bogor Paradox" the survival of poverty pockets amidst rapid regional economic growth. This study evaluates the effectiveness of Village Fund Direct Cash Assistance (BLT-Dana Desa) on the consumption of extreme poverty Beneficiary Groups (KPM) and dissects underlying structural factors. Methodologically, it employs a mixed-methods approach with an explanatory sequential design. The quantitative phase examines secondary data via linear regression, while the qualitative phase analyzes the implementation context through interviews and field observations based on Merilee S. Grindle and Martin Ravallion's frameworks, validated via data triangulation. Quantitative findings indicate BLT-Dana Desa can't explain inter-household consumption variability due to uniform assistance amounts, though it remains a crucial basic economic cushion. Meanwhile, qualitative analysis confirms a geographic poverty trap; funds are depleted for short-term consumption due to low capital productivity driven by physical isolation, post-disaster ecological vulnerability, and weak village-level data governance. In conclusion, BLT-Dana Desa serves as an effective temporary safety net but fails to structurally graduate beneficiaries. Recommendations include reformulating adaptive Village Fund allocations and transforming aid into area-based productive economic empowerment.

Keywords: *Village Funds, Extreme Poverty, Bogor Paradox, Sequential Explanatory Mixed Method.*

DAFTAR ISI

LEMBAR PERSETUJUAN TESIS	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	vii
<i>ABSTRACT</i>	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xi
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I Pendahuluan	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi Masalah	18
C. Rumusan Masalah	19
D. Tujuan Penelitian	20
E. Manfaat Penelitian	20
BAB II Tinjauan Pustaka	23
A. Penelitian Terdahulu	23
B. Tinjauan Kebijakan dan Teoritis	31
C. Konsep Kunci	62
D. Kerangka Berpikir	65
BAB III Metodologi Penelitian	70
A. Metode Penelitian	70
B. Teknik Pengumpulan Data	73
C. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	75
D. Instrumen Penelitian	77

BAB IV Hasil Penelitian dan Pembahasan.....	79
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	79
B. Analisis Kuantitatif Pengaruh Kontribusi dan Kebermanfaatan Pemberian BLT Dana Desa Terhadap Ketercukupan Pengeluaran Minimum Konsumsi Harian Masyarakat Miskin Ekstrem yang terkategori KPM BLT-Dana Desa di Desa Cileuksa	95
C. Analisis Berdasarkan Dua Perspektif Pengaruh Kepentingan Para Aktor Birokrat terkait Kebijakan Pemanfaatan Dana Desa Bagi Penanganan Kemiskinan Ekstrem dan Tipe Manfaat yang Dirasakan Masyarakat Miskin Ekstrem dengan Adanya Dana Desa dan BLT-Dana Desa, Kondisi Spasial, Ekologi dan Ekonomi di Wilayah Desa Cileuksa sebagai Bagian dari Wilayah Peri-Urban	121
D. Analisis Strategi Kebijakan yang Efektif dalam Upaya Pengentasan Kemiskinan Ekstrem di Desa Cileuksa	140
BAB V Penutup	145
A. Simpulan	145
B. Saran	146
DAFTAR PUSTAKA	147
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP PENELITI	

DAFTAR TABEL

Tabel.1.1.	Persentase Angka Kemiskinan Umum dan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Periode Peristiwa	7
Tabel 1.2.	Persentase Kontribusi Kemiskinan Ekstrem terhadap Kemiskinan.....	7
Tabel 1.3.	Perbandingan Parameter Kemiskinan Eksrem secara Dikotomi Fundametal di 5 Provinsi di Indonesia	11
Tabel.1.4.	Perbandingan Komparatif Indikator Kemiskinan Prioritas 1 (Miskin Ekstrem) di Jawa Barat	14
Tabel 2.1.	Komparasi Dana Desa dan Alokasi Dana Desa	37
Tabel 2.2.	Komparasi Transisi Berdasarkan Regulasi Penetapan Nominal BLT-Dana Desa	48
Tabel 3.1.	Informan Kunci (Key Informan)	72
Tabel 4.1.	Batas Administrasi Daerah di Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor	83
Tabel 4.2.	Klasifikasi Profesi Pekerjaan Masyarakat di Desa Cileuksa Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, Jawa Barat	84
Tabel 4.3.	Data Profil Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Dana Desa di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor	85
Tabel 4.4.	Data Estimasi Pengeluaran Minimum Masyarakat berdasarkan Biaya Unit per Kapita	89
Tabel 4.5.	Data Estimasi Pengeluaran Minimum Masyarakat berdasarkan Ukuran Keluarga dan Jumlah Tanggungan	89
Tabel 4.6.	Data Estimasi Pengeluaran Minimum Masyarakat berdasarkan Kategori Pekerjaan	90

Tabel 4.7.	Variabel Data Penelitian Kuantitatif Uji Asumsi Klasik dan Uji Hipotesis	97
Tabel 4.8.	Analisis Sumber Varias Uji Signifikasi Simultan Model 1	105
Tabel 4.9.	Data Koefisien Determinasi Statistik Model 1.....	106
Tabel 4.10.	Analisis t Hitung Uji Parsial Model 2	111
Tabel 4.11.	Analisis F Hitung Uji Signifikansi Simultan	113
Tabel 4.12.	Analisis Sumber Varians Uji Signifikansi Simultan	114
Tabel 4.13.	Elaborasi Hasil Pengujian Statistik Model secara Komparatif	118

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Perkembangan Kemiskinan dan Ketimpangan Nasional (2020-2025) berdasarkan Gini Ratio	4
Gambar 1.2.	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin di Indonesia (Maret 2015-2023)	5
Gambar 1.3.	Diagram Sandingan Jumlah Penduduk Miskin di wilayah Desa dibanding Perkotaan pada Semester 1 Tahun 2023	6
Gambar 1.4.	Peta Komposisi Kategorisasi Miskin dan Miskin Ekstrem di Indonesia berdasarkan Individu/Masyarakat Tahun 2023	9
Gambar 1.5.	Sandingan Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di 34 Provinsi Tahun 2023	9
Gambar 1.6.	Sandingan Tren Gini Ratio Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah	10
Gambar 1.7.	Sandingan Jumlah Populasi Penduduk terhadap Jumlah Individu Rentan hingga Miskin Ekstrem Provinsi Jawa Barat 2024	12
Gambar 1.8.	Sandingan Alokasi Pagu Dana Desa Provinsi Jawa Barat pada 18 Kabupaten Lokasi Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2021-2023	13
Gambar 1.9.	Sandingan Jumlah Populasi Penduduk terhadap Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem (Desil 1) basis kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2024	15
Gambar 1.10.	Komparasi Data Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor Tahun 2023-2024	17
Gambar 1.11.	Komparasi Alokasi Anggaran BLT-Dana Desa di Kecamatan Sukajaya Basis Desa Tahun 2023-2024	17

Gambar 2.1.	Kerangka Berpikir Grindle dan Martin Ravallion.....	65
Gambar 3.1.	Alur Pikir proses Data Kualitatif menurut Miles, Huberman, dan Saldana	75
Gambar 4.1.	Peta Tematik Topografi Kabupaten Bogor	81
Gambar 4.2.	Akses Jalan dan Lingkungan Huntara di Desa Cileuksa Kaler, Kecamatan Sukajaya, Kab. Bogor	81
Gambar 4.3.	Akses menuju Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kab. Bogor	82
Gambar 4.4.	Akses Jalan menuju Kantor Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kab. Bogor	82
Gambar 4.5.	Wilayah Lahan Pertanian Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kab. Bogor	86
Gambar 4.6.	Kondisi SD Negeri 02 Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kab. Bogor	92
Gambar 4.7.	Kondisi SD Negeri 05 Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kab. Bogor	92
Gambar 4.8.	Kondisi Belajar-Mengajar di SD Negeri 05 Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kab. Bogor	92
Gambar 4.9.	Kondisi Bangunan PAUD Al-Farish Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, Kab. Bogor	93
Gambar 4.10.	Kondisi Bangunan Poskesdes Desa Cileuksa	94
Gambar 4.11.	Kondisi Bangunan Sekretariat BUMDes Desa Cileuksa	95
Gambar 4.12.	Diagram Pencar Analisis Pengaruh Variabel	101
Gambar 4.13.	Analisis Daerah Penerimaan Uji Parsial Model 1	104
Gambar 4.14.	Analisis daerah Penerimaan Signifikansi Simultan	105
Gambar 4.15.	Diagram Pencar Analisis Pengaruh Variabel	109
Gambar 4.16.	Analisis Daerah Penerimaan Uji Parsial Model 2	112
Gambar 4.17.	Analisis daerah Penerimaan Signifikansi Simultan	115

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara Penelitian Kualitatif
Lampiran 2	Output Data Statistik Regresi Desa Cileuksa Model 1
Lampiran 3	Output Data <i>Analysis</i> Regresi Desa Cileuksa Model 1
Lampiran 4	Output Data Statistik Regresi Desa Cileuksa Model 2
Lampiran 5	Output Data <i>Analysis</i> Regresi Desa Cileuksa Model 2
Lampiran 6	Data <i>By Name By Address</i> (BNBA) Miskin Ekstrem Desa Cileuksa

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Hingga tahun terakhir Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 (RPJMN 2020-2024), tingkat kemiskinan ekstrem di Indonesia diketahui belum memenuhi target secara absolut pada angka nol persen, hal tersebut dikemukakan (Wibisono, 2025) pada naskah *policy brief* yang disampaikan. Lebih lanjut beliau menjelaskan bahwa rasio tingkat kemiskinan ekstrem pada Maret 2024 tercatat sebesar 0,83% hingga 0,85%. Meskipun secara *trend* hal ini menandakan penurunan secara signifikan secara *year on year* (YoY) pada periode sebelumnya, ketidakberhasilan meraih target nol persen memerlukan dekonstruksi mendalam terhadap akar permasalahan, dilihat dari aspek regulasi maupun implementasi di lapangan.

Secara fundamental, terdapat berbagai hipotesis yang mungkin, untuk menjadi faktor apabila dilihat dari ruang lingkup multidimensi. Berdasarkan dokumen yang dilansir (Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, 2025) guncangan secara eksternal yang tidak dapat diprediksi melalui hadirnya fenomena pandemi Virus Corona (COVID-19) yang bukan hanya melumpuhkan aktivitas ekonomi berbagai elemen masyarakat, namun juga memaksa pemerintah untuk melakukan reorientasi kebijakan fiskal secara masif. Arah pembangunan yang semula di fokuskan pada pemberdayaan struktural bergeser kepada jaring pengaman sosial untuk menghambat laju kemiskinan pada kelompok rentan. Kebijakan ini merupakan langkah efektif dalam mencegah ledakan kemiskinan, namun hal ini menghambat pada akselerasi program-program yang bersifat permanen untuk mereduksi kantong-kantong kemiskinan ekstrem.

Persoalan lainnya yang turut serta dalam mempengaruhi peningkatan angka kemiskinan di Indonesia salah satunya adalah hadirnya fenomena iklim

berupa El-Nino. El Nino, dapat dikatakan sebagai sebuah fenomena yang bersifat siklus atau bersifat berulang pada periode tertentu. Fenomena ini mayoritas terjadi di bagian tengah dan timur dari wilayah Samudera pasifik. Penyebab terjadinya fenomena ini ditandai oleh kenaikan tingkat suhu muka air laut secara tidak normal, yang kemudian berdampak pada iklim/cuaca secara global. Hal ini mengakibatkan terjadinya perubahan secara signifikan pada pola intensitas curah hujan, suhu, dan arah angin termasuk atmosfer pada berbagai wilayah dunia termasuk diantaranya di wilayah Indonesia. Dampak yang ditimbulkan dari persoalan ini bagi masyarakat dan sumber daya berupa terjadinya potensi penurunan produksi dari hasil pertanian serta lonjakan harga pangan sehingga menimbulkan gejolak ekonomi dan sosial ditengah masyarakat (Ibrahim et al., 2024, p. 77).

Ibrahim et al. (2024) melanjutkan bahwa secara faktual dampak yang ditimbulkan dari fenomena El-Nino ini berdampak pada tingkat miskin ekstrem yang dikategorikan menurut Desil-1 hingga Desil-3. Hal tersebut dibuktikan dari upaya mitigasi resiko yang dilakukan oleh pihak Pemerintah Indonesia berfokus pada upaya pemeliharaan daya beli masyarakat, utamanya kepada masyarakat dengan tingkat ekonomi menengah ke bawah dalam mencukupi kebutuhan pangan melalui pendistribusian beras sebagai bentuk dari bagian program Cadangan Pangan Pemerintah (CPP).

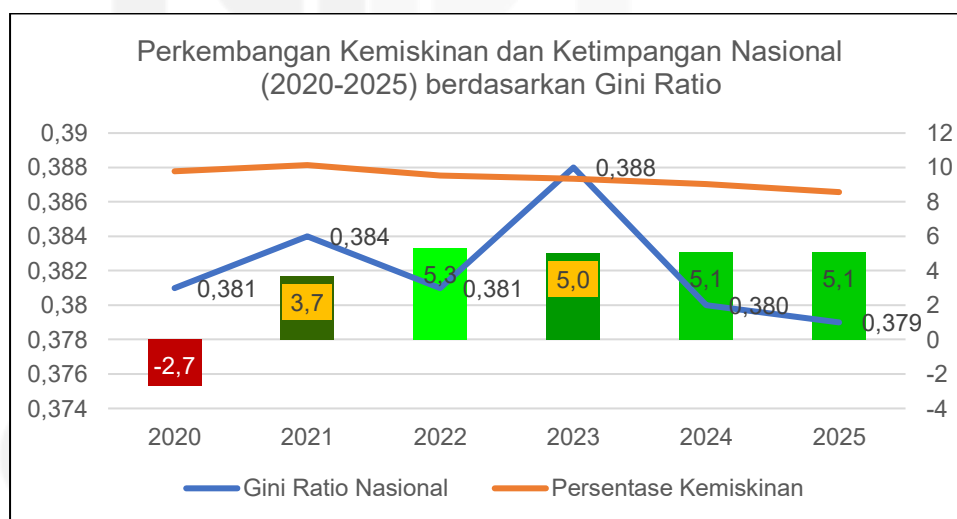
Lebih lanjut, beliau juga menyampaikan bahwa data yang dipergunakan sebagai acuan dalam penyaluran distribusi bantuan tersebut menggunakan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial, dan Data Pendataan Keluarga (PK) dari pihak BKKBN. Namun, data DTKS diketahui belum cukup efektif dalam menyentuh kalangan kelompok miskin ekstrem, dikarenakan terdapat potensi ketidaksesuaian penyaluran bantuan dari Kelompok Penerima Manfaat. Hal ini kemudian diperkuat oleh temuan dari suatu survei yang dilakukan terhadap program-program seperti BST, BPNT, PKH, dan BLT.

Ketidaksesuaian tersebut berkaitan dengan validitas dan integrasi data sasaran, seperti yang tertuang pada laporan yang disampaikan oleh (Kemenko PMK, 2024) bahwa keberhasilan program kemiskinan termasuk kemiskinan ekstrem sangat bergantung pada akurasi identifikasi penerima manfaat, namun pada praktiknya terdapat disparitas antara DTKS terhadap kondisi riil sebenarnya, yang diperparah dengan belum optimalnya pemanfaatan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) pada tingkat daerah di fase awal implementasi. Ariansyah dkk. (2025) lebih lanjut menambahkan bahwa ketidakakuratan data ini menimbulkan fenomena ketidaksesuaian sasaran penerima, dimulai dari masyarakat miskin yang tidak terdaftar (*exclusion error*) hingga masyarakat terkategori relatif mampu namun tetap memperoleh bantuan (*inclusion error*).

Selain persoalan yang diakibatkan oleh fenomena pandemi, fenomena iklim, dan inkonsistensi data DTKS termasuk belum optimalnya pemanfaatan data P3KE, perlu kita analisis bersama penyebab lain kegagalan dari program pengentasan kemiskinan ekstrem, seperti fenomena ketimpangan dalam distribusi pendapatan yang diukur melalui koefisien Gini atau dikenal *Gini Ratio*. Koefisien ini menjadi sebuah determinan krusial dalam memahami kemiskinan secara struktur di suatu wilayah. Mara & Rambey (2018) menyampaikan bahwa ketimpangan pendapatan secara ekstrem bukan hanya sekedar masalah statistik, melainkan representasi dari inefisiensi ekonomi, melemahnya stabilitas sosial dan ketimpangan distribusi sumber daya.

Lestari (2023) lebih lanjut menambahkan penjelasan bahwa *Gini Ratio* menjadi instrument penting dalam membedah penyebab penurunan angka kemiskinan makro yang seringkali tidak serta-merta menghapus kantong-kantong kemiskinan ekstrem. Beliau kemudian menjelaskan bahwa hubungan antara pertumbuhan ekonomi, disparitas, dan kemiskinan membentuk sebuah segitiga kausalitas yang bersifat kompleks, yang mana tingkat disparitas yang tinggi cenderung menghambat dampak positif dalam pertumbuhan ekonomi terhadap penurunan kemiskinan utamanya kemiskinan ekstrem.

Syahri & Gustiara (2020) mengungkapkan bahwa korelasi antara *Gini Ratio* dan kemiskinan sejatinya bersifat *linear* hal tersebut dapat kita simak dalam berbagai kasus, kenaikan tingkat disparitas mayoritas menuju pada peningkatan intensitas kemiskinan. Lestari (2023) menambahkan, secara *Gini Ratio* perkembangan makro bagi kemiskinan dan ketimpangan nasional di tahun 2020 hingga 2025 dapat kita simak melalui Gambar 1.1 indikator makro ekonomi nasional terkait kemiskinan dan ketimpangan selama periode pengamatan.



Gambar 1.1. Perkembangan Kemiskinan dan Ketimpangan Nasional (2020-2025) berdasarkan *Gini Ratio*

sumber: data diolah dari Badan Pusat Statistik, 2025

Lestari (2023) kemudian menjelaskan bahwa secara analisis umum dengan melihat pada Gambar 1.1, periode 2020 merupakan sebuah *critical juncture* bagi perekonomian global maupun nasional akibat pandemi. Laju pertumbuhan ekonomi Indonesia mengalami kontraksi hingga -2,7% pada awal tahun 2020, hal ini secara langsung memantik peningkatan *Gini Ratio* dari 0,381 menjadi 0,384 s.d 0,385 pada periode selanjutnya. Peningkatan ini mencerminkan guncangan ekonomi yang berdampak secara regresif, yang bermakna bahwa penduduk miskin dan rentan miskin mengalami penurunan pendapatan yang lebih curam dibandingkan kelompok elit.

Lebih lanjut beliau juga menyampaikan bahwa, meskipun di tahun 2021 ekonomi beranjak pulih dengan pertumbuhan ekonomi pada kuadran positif di 3,7% dan terus mengalami penguatan hingga kisaran 5,1% pada 2024 s.d 2025, pernyataan mengenai kondisi kemiskinan tersebut kemudian diperkuat melalui Gambar 1.2 yang menjelaskan mengenai kondisi jumlah dan persentase penduduk terhadap jumlah penduduk miskin yang di akibatkan oleh terjadinya fenomena wabah pandemi dan El-Nino.



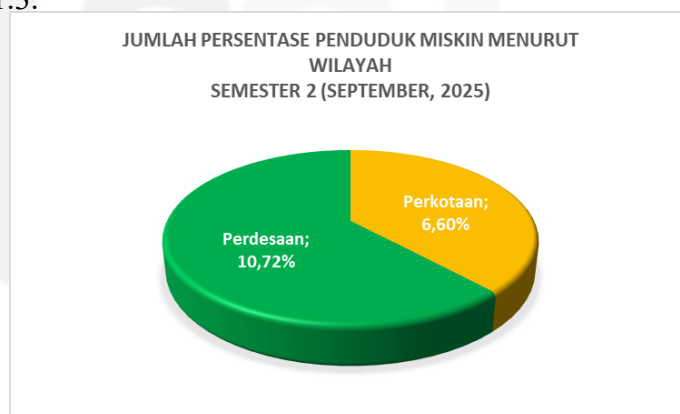
Gambar 1.2. Jumlah dan Persentase Penduduk miskin di Indonesia (Maret 2015-2023)

sumber: databoks.katadata.co.id & Data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2015-Mar 2023

Kenaikan antara tahun 2019 ke 2020 sesuai pada data sebagaimana terlihat pada Gambar diatas, dapat mencapai 29,9 Juta Jiwa (1,6%), dan antara 2019 hingga 2021 mencapai 50,78 Juta Jiwa (2,8%), namun secara realita (Oktaviani et al., 2025) mengemukakan bahwa disparitas antara wilayah perkotaan secara konsisten lebih tinggi dibandingkan di wilayah pedesaan, meskipun tingkat kemiskinan ekstrem justru mayoritas lebih terpusat di wilayah pedesaan.

Penjelasan sebagaimana disampaikan oleh (Oktaviani et al., 2025) nampak terlihat dari konsentrasi distribusi penduduk miskin perkotaan, dan pedesaan menunjukan bahwa perbandingan jumlah masyarakat miskin di tingkat desa dan pedesaan lebih dominan apabila disandingkan dengan di tingkat

perkotaan yaitu 55:45, walaupun tingkat pengangguran, dan kelahiran atas keluarga miskin baru dan berbagai kelompok marginal lebih dominan di wilayah perkotaan, namun secara data menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan hingga semester 2 September tahun 2025 adalah sejumlah 10,72%, sedangkan di wilayah perkotaan hanya 6,60% (BPS, 2025). Disparitas kemiskinan di perdesaan dan perkotaan terdeskripsi melalui Gambar 1.3.



Gambar 1.3. Diagram Sandingan Jumlah Penduduk Miskin di wilayah Desa dibanding Perkotaan pada Semester 1 Tahun 2023
sumber: Badan Pusat Statistik (BPS, 2025) (diolah Peneliti)

Melihat terhadap diagram serta penjelasan diatas, hal ini menandakan bahwa tingkat kemiskinan bukan hanya diukur dari meningkatnya angka pengangguran, namun juga terdapat faktor lain seperti lemahnya tingkat Pendapatan di desa, lemahnya daya beli masyarakat, lemahnya perputaran roda perekonomian di desa, masih terdapat stigma di masyarakat untuk melaksanakan urbanisasi, dan faktor lainnya yang perlu diidentifikasi lebih lanjut.

Kemiskinan dan kemiskinan ekstrem sebagaimana disinggung dan dibahas pada penjelasan sebelumnya secara kerangka teoretis-konseptual, menjelaskan bahwa istilah kemiskinan ekstrem merupakan *subset* atau bagian kecil dari kemiskinan secara umum ((TNP2K), n.d., pp. 1–5).

Lebih lanjut, urgensi dalam penanganan kemiskinan ekstrem, dapat diketahui melalui proporsi kemiskinan ekstrem terhadap kemiskinan secara umum pada tingkat nasional yang dipengaruhi oleh transisi standar paritas

daya beli dari US\$ 1,90 PPP menjadi US\$ 2,15 PPP (Utomo, 25 C.E.). Penyesuaian standar baru menjadi US\$ 2,15 PPP memperluas cakupan populasi miskin secara signifikan, penyesuaian ini mengkonversi rasio perbandingan menjadi 1:7,08 dari semula 1:11,16, dimana kontribusi kemiskinan ekstrem terhadap total kemiskinan nasional melonjak secara tajam hingga menyentuh 14,12% pada Maret 2024, hal ini disampaikan oleh (Utomo, 25 C.E.) dalam artikel yang ia publikasikan. Adapun secara gambaran persentase kedua variabel diatas, dapat kita ketahui melalui Tabel 1.1. dan Tabel 1.2.

Tabel 1.1. Persentase Angka Kemiskinan Umum dan Kemiskinan Ekstrem berdasarkan Periode Peristiwa

Tahun	Angka Kemiskinan Umum (%)	Angka Kemiskinan Ekstrem (%)	Proporsi ME thd Kemiskinan (%)	Peristiwa
2018	9,82	5,44	55,4	Stabilitas Pra-Pandemi
2019	9,22	3,7	40,1	Isu Awal Pandemi
2020	9,78	3,8	38,9	Wabah Pandemi Covid 19
2021	10,14	2,14	21,1	Program Pemulihan Ekonomi (PEN)
2022	9,54	2,04	21,4	Penerapan Inpres No. 4 Tahun 2022

sumber: BPS, Maret 2022 (diolah Peneliti)

Tabel 1.2. Persentase Kontribusi Kemiskinan Ekstrem terhadap Kemiskinan

Periode Analisis	Batas Pengukuran Kemiskinan Ekstrem (PPP)	Jumlah Jiwa Miskin Ekstrem (Juta Jiwa)	Jumlah Jiwa Miskin Nasional (Juta Jiwa)	Kontribusi Kemiskinan Ekstrem (%)	Persentase Kemiskinan Ekstrem terhadap Populasi (%)
Maret 2024	US\$ 1,90 PPP	2,26	25,22	8,96%	0,83%
Maret 2024	US\$ 2,15 PPP	3,56	25,22	14,12%	1,26%
September 2024	US\$ 1,90 PPP	2,30	24,06	9,56%	0,83%
September 2024	US\$ 2,15 PPP	2,78	24,06	11,55%	0,99%
Maret 2025	US\$ 2,15 PPP	2,38	23,85	9,98%	0,85%

sumber: World Bank dan BPS, 2025, (diolah Peneliti)

Evaluasi yang dilakukan secara empiris dengan melihat pada Tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2018 proporsi jumlah masyarakat ekstrem mencapai 55,4% terhadap masyarakat miskin, namun ketika Tahun 2021 Indonesia mulai memfokuskan pada formulasi kebijakan dalam penerapan PEN, proporsi tersebut mengalami reduksi secara cukup signifikan. Selanjutnya, pada Tabel 1.2 meskipun tren penurunan persentase kemiskinan

ekstrem terus mengalami penurunan hingga Maret 2025 sebesar 0,85% (US\$ 2,15 PPP) dari total populasi, kemiskinan ekstrem merupakan bentuk manifestasi nyata dari kemiskinan kronis struktural (Alfirman et al., 2024). Prioritas kebijakan untuk menghapuskan kemiskinan ekstrem menurut (Sugiharti et al., 2023) terbukti secara ilmiah sebagai strategi paling efisien untuk mengurangi kedalaman disparitas sosial dan menghentikan transmisi kemiskinan lintas generasi.

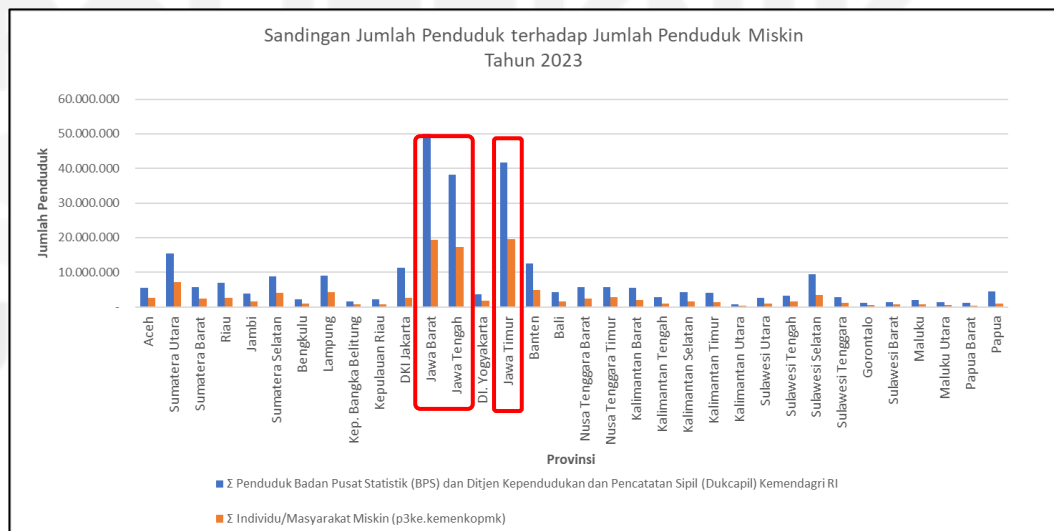
Upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Indonesia merupakan agenda nasional yang bersifat mendesak, dipandu oleh visi mencapai tingkat nol persen pada akhir tahun 2024 dan dilanjutkan dalam RPJMN 2025-2029. Pelaksanaan dalam program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (PPKE) seoyogya telah dilakukan sejak tahun 2020-2024, dan di bentuk *by design* secara komprehensif melalui Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2022 sebagaimana dilansir oleh (Kemenko PMK, 2024). Namun demikian, ketidaksesuaian antara regulasi yang bersifat terpusat dengan fleksibilitas eksekusi di tingkat lokal, seperti halnya pemerintah daerah yang belum berkemampuan menerjemahkan instruksi nasional ke dalam program inovatif yang sesuai dengan karakteristik kewilayahan, sehingga intervensi yang dilakukan dominan bersifat homogen/seragam dalam bentuk bantuan tunai kepada masyarakat, tanpa menyentuh akar permasalahan secara spesifik pada masing-masing daerah tertentu (Anirwan, 2022).

Secara diskursus penentuan lokus intervensi kebijakan, terdapat dikotomi fundamental antara pemilihan wilayah berdasarkan (kualitas) atau jumlah penduduk miskin secara absolut (kuantitas). Apabila parameter yang utama yang kita gunakan dalam penelitian ini difokuskan pada jumlah penduduk miskin ekstrem terbanyak secara absolut menurut data P3KE dan DTKS, maka kita mencoba merujuk pada 212 lokus prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem basis Kabupaten/Kota di tahun 2022 sebagai identifikasi awal untuk menentukan urgensi lokus pengentasan kemiskinan, secara sebaran data diketahui bahwa lokasi-lokasi paling *crucial* dengan sebaran

tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi mayoritas terdapat di pulau jawa. Hal tersebut dibuktikan berdasarkan data P3KE yang diterbitkan oleh Kemenko PMK di semester ke-2 tahun 2023. Penggambaran atas sebagaimana telah di jelaskan diatas terdeskripsi melalui Gambar 1.4 dan Gambar 1.5.



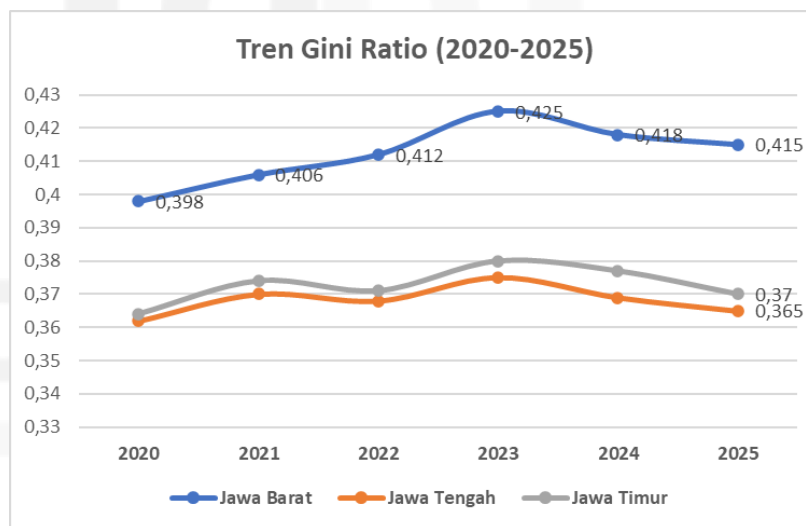
Gambar 1.4. Peta Komposisi Kategorisasi Miskin dan Miskin Eskترم di Indonesia berdasarkan Individu/Maskayarakat Tahun 2023
sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id>, (diolah Peneliti)



Gambar 1.5. Sandangan Jumlah Penduduk terhadap Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem di 34 Provinsi Tahun 2023
sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id>, (diolah Peneliti)

Menurut sebaran data, dilihat dari status kesejahteraan rumah tangga yang terkategori desil ke-1, Provinsi Jawa Timur menduduki peringkat pertama dengan total 5.347.786 jiwa, kemudian Provinsi Jawa Tengah dengan total

5.079.790 jiwa RT/KK, dan Provinsi Jawa Barat dengan total 5.303.597 jiwa. Sebagaimana tersebut diatas, maka hal ini menjadi perhatian bersama untuk segera di tindak lanjuti sebagai fokus prioritas utama. Selain itu, apabila kita memandang secara analisis komparatif regional, Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Jawa Barat merupakan wilayah kontributor utama sebagai Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional, namun hal ini menimbulkan anomali di mana pertumbuhan industri yang masif seringkali berjalan beriringan dengan tingkat ketimpangan yang presisten. Diantara ketiga Provinsi tersebut, Provinsi Jawa Barat secara konsisten mencatatkan *Gini Ratio* yang lebih tinggi hal tersebut terlihat melalui Gambar 1.6.



Gambar 1.6. Sandingan Tren Gini Ratio Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah
sumber: BPS, 2025 (diolah Peneliti)

Ketimpangan yang dialami Jawa Barat, di picu oleh konsentrasi industri manufaktur di wilayah utara dan pusat jasa di wilayah perkotaan, hal ini menciptakan disparitas pendapatan yang sangat kontras antara nuruh industri terampil dengan pekerja informal atau buruh tani di wilayah selatan (BPS Jawa Barat, 2025). Komparasi ketimpangan yang dialami Jawa Barat apabila dibandingkan dengan wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur bahwa, Jawa Tengah secara distribusi pendapatan jauh lebih merata ketimbang Jawa Barat (Haidir & Setyari, 2024), sedangkan menurut (BPS, 2025, p. 20) Jawa Timur

memiliki *Gini Ratio* yang relatif stabil, hal ini mencerminkan keseimbangan yang lebih baik antara pertumbuhan industri dan sektor pertanian dibandingkan Jawa Barat.

Tabel 1.3. Perbandingan Parameter Kemiskinan Ekstrem secara Dikotomi Fundamental di 5 Provinsi di Indonesia

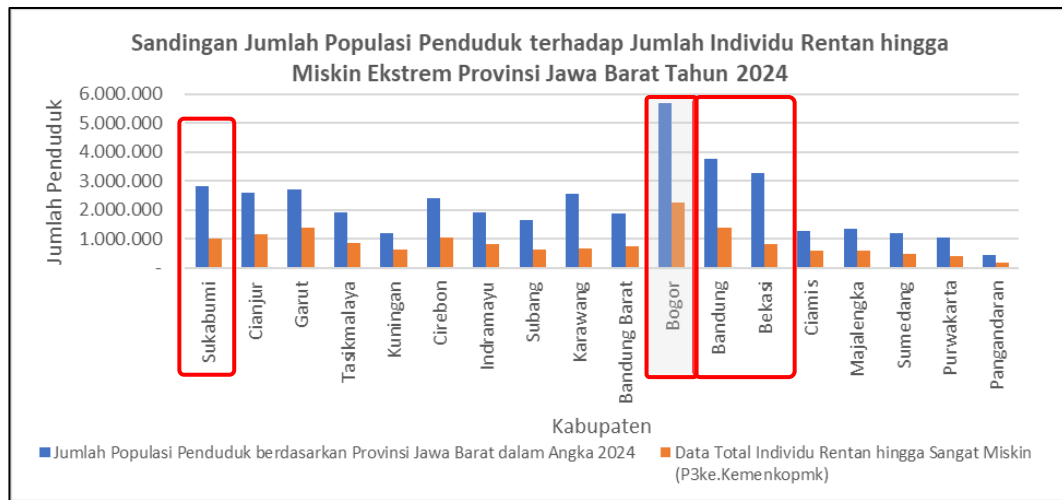
Parameter Perbandingan	Jawa Barat	Jawa Timur	Jawa Tengah	Papua Tengah	Papua Pegunungan
Jumlah Miskin Ekstrem (Absolut)	± 569.000 jiwa	± 268.645 jiwa	± 689.714 jiwa	± 85.500 jiwa	± 73.000 jiwa
Persentase Miskin Ekstrem	1,10%	0,66%	(Data Terfragmentasi)	8,55%	6,59%
Populasi Total	± 61,6 Juta	± 41,5 Juta	± 37,0 Juta	± 1,03 Juta	± 1,10 Juta
Status Kemiskinan Umum (P0)	7,46%	9,79%	10,47%	29,76%	32,97%

sumber: Analisis data BPS Maret 2024 dan P3KE (diolah Peneliti)

Narasi diatas kemudian diperkuat melalui Tabel 1.3 yang merupakan bentuk representasi dari teori Martin Ravallion mengenai kebijakan publik dalam konteks kemiskinan ekstrem dimana wilayah dengan jumlah penduduk besar memberikan kontribusi yang jauh lebih signifikan terhadap penurunan angka kemiskinan nasional (Suryadi, 2022). Meskipun Total penduduk miskin ekstrem di wilayah Papua Tengah dan Papua Pegunungan digabungkan (sekitar 158.500 jiwa) masih jauh lebih kecil dibandingkan jumlah penduduk miskin ekstrem di Jawa Barat (569.000 jiwa)(Hasyati & Holis, 2025). Secara sudut pandang kebijakan makro, penanganan di Jawa Barat lebih mendesak karena volume individu yang terdampak cukup besar. Fokus pada wilayah Papua memang penting dari perspektif keadilan spasial, namun fokus pada Jawa Barat merupakan keharusan dari sisi pencapaian target kemiskinan nasional nol persen (Suryadi, 2022).

Berikutnya, apabila kita tinjau secara lebih dalam berdasarkan basis Kabupaten yang menjadi basis lokus dalam intervensi pemerintah khususnya Kemendesa PDT, terdapat 13 Kabupaten terkategori sebagai lokasi prioritas penghapusan kemiskinan ekstrem dari total 18 Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. hal ini menandakan bahwa secara proporsi 72,22% Kabupaten di Provinsi Jawa Barat terkategori dalam fokus prioritas kemiskinan ekstrem.

Penggambaran atas sebagaimana telah di jelaskan diatas terdeskripsi melalui Gambar 1.7.



Gambar 1.7. Sandingan Jumlah Populasi Penduduk terhadap Jumlah Individu Rentan hingga Miskin Ektrem Provinsi Jawa Barat 2024
sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id>, (diolah Peneliti)

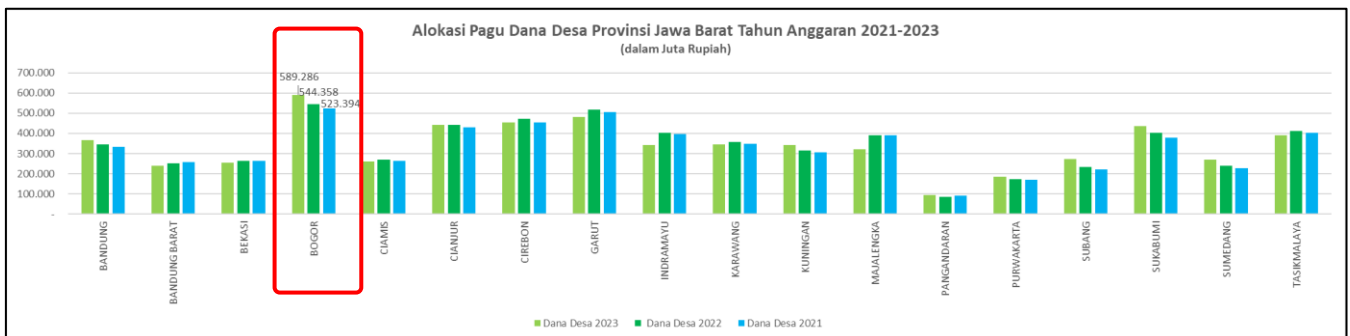
Berdasarkan 13 Kabupaten yang menjadi lokus dan fokus prioritas percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem sebagaimana terlihat pada Gambar 1.7, jumlah masyarakat miskin ekstrem menurut desil ke-1 secara basis Masyarakat/Individu terbanyak terdapat pada lokasi Kabupaten Bogor yaitu 2.241.597(39,45%) jiwa. Selain itu, Kabupaten Bogor juga termasuk peringkat pertama dengan jumlah keluarga miskin ekstrem menurut Desil ke-1 yaitu sebanyak 560.593 (39,55%) Rumah Tangga/Keluarga. Bappeda (2021) turut menyampaikan bahwa meskipun terdapat beberapa kabupaten yang masuk dalam kategori Prioritas 1 penanggulangan kemiskinan ekstrem seperti Garut, Bandung, Indramayu, Cianjur, Karawang, Kuningan dan Bekasi.

Secara data yang tertuang pada Gambar 1.7 beberapa diantara kabupaten tersebut, tidak nampak dan justru hanya beberapa yang sesuai terhadap data yang tersaji, namun lebih daripada itu Kabupaten Bogor muncul sebagai kandidat yang paling *crucial* mengingat kabupaten ini memiliki paradoks yang unik selain dikarenakan posisi secara geografis sebagai wilayah penyangga ibu kota, beban populasi absolut yang masif serta ketersediaan

data mikro P3KE yang cukup komprehensif untuk dianalisis melalui pendekatan Desil 1-10 (Bappenas, 2024), dan kabupaten ini merupakan episentrum dari tantangan kemiskinan ekstrem nasional.

Dalam studi kebijakan publik, persentase kemiskinan seringkali menyesatkan jika tidak disandingkan dengan jumlah jiwa yang terdampak. Meskipun Kabupaten Indramayu atau Kuningan memiliki persentase kemiskinan yang jauh lebih tinggi, dimana masing-masing mencapai 12,13% dan 12,12% pada tahun 2023 jumlah jiwa yang harus dientaskan di Kabupaten Bogor jauh melampaui wilayah-wilayah tersebut karena basis populasi secara total sangat besar (Setiawan, 2025).

Hal menarik lainnya, apabila merujuk pada sisi penganggaran, dimana hal tersebut terlihat dari pemanfaatan penggunaan APBN bagi kesejahteraan masyarakat desa dan perdesaan, terkhusus bagi wilayah di Provinsi Jawa Barat dapat diketahui sebagaimana tertuang pada Gambar 1.8.



Gambar 1.8. Sandingan Alokasi Pagu Dana Desa Provinsi Jawa Barat pada 18 Kabupaten Lokasi Kemiskinan Ekstrem Tahun Anggaran 2021-2023
sumber: <https://monevdd.kemendes.go.id/> (diolah Peneliti)

Grafik pada Gambar 1.8, menjelaskan mengenai alokasi Dana Desa pada cakupan basis provinsi, yang mana kita ketahui untuk Kabupaten Bogor, memiliki Dana Desa terbesar pertama yaitu sebesar 589,2 miliar rupiah di tahun 2023. Hal ini menjadi sebuah paradoks besar bahwa dengan alokasi yang cukup tinggi, namun tingkat keluarga dan masyarakat miskin ekstremnya juga tinggi.

Fenomena persentase kemiskinan yang cenderung lebih rendah ditambah dengan alokasi dana yang memadai menutupi fakta bahwa hampir setengah juta jiwa masih hidup di bawah garis kemiskinan menjadikan Kabupaten Bogor dikenal dengan sebutan “Paradoks Bogor”. Gambaran atas kondisi tersebut dapat terlihat melalui Tabel 1.4.

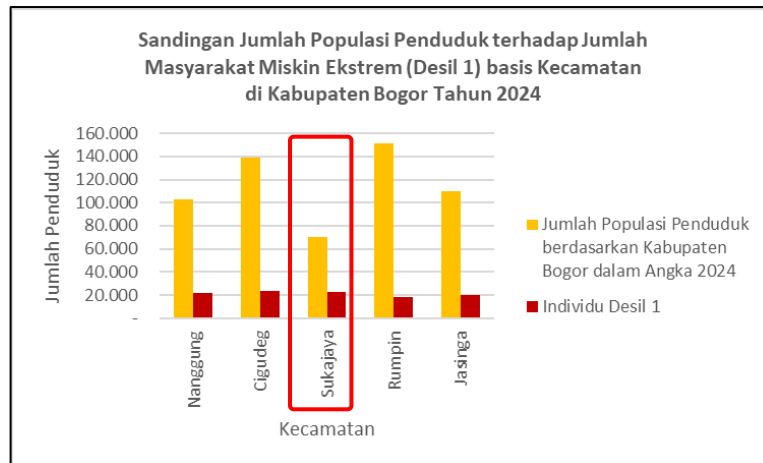
Tabel 1.4. Perbandingan Komparatif Indikator Kemiskinan Prioritas 1 (Miskin Ekstrem) di Jawa Barat

Kabupaten	ME 2023 (%)	Tren 2024 (%)	Estimasi 2025 (%)	Beban Populasi	Urgensi Penelitian
Bogor	7,27	7,05	6,26	Tertinggi (Absolut)	Paradoks Peri-Urban & Populasi Besar
Indramayu	12,13	11,93	11,02	Tinggi (relatif)	Karakteristik Agraris Tradisional
Kuningan	12,12	11,88	10,74	Sedang	Kemiskinan Struktural Pedesaan
Cianjur	10,22	10,14	9,82	Tinggi	Dampak Pasca-Bencana & Agraris
Garut	9,77	9,68	9,39	Tinggi	Kantong Kemiskinan wilayah Pegunungan
Karawang	7,87	7,86	7,08	Sedang	Transisi Industri - Pertanian
Bandung	6,4	6,19	6,04	Sedang	Urbanisasi Terencana
Bekasi	4,93	4,8	4,36	Rendah	Industri Matang

sumber: Bappedalitbang Kabupaten Bogor, 2025 (diolah Peneliti)

Menurut gambaran tabel diatas, Kabupaten Bogor juga tergolong ke dalam kemiskinan peri-urban, dimana wilayah peri-urban didefinisikan sebagai wilayah dengan sifat kekotaan dan kedesaan yang bercampur, dan dimana terjadi perubahan struktur dari agraris menjadi non-agraris (Sugiharto & Agustin, 2023). Kabupaten Bogor menghadapi tantangan berupa “kantong-kantong kemiskinan” yang terisolasi secara infrastruktur namun secara geografis dekat dengan pusat pertumbuhan (Bapperida, 2024).

Selanjutnya, untuk mengetahui secara lebih komprehensif lokus prioritas pada tingkatan mikro yang memiliki kedalaman jumlah masyarakat sangat miskin (Desil 1) berdasarkan pada data mikro P3KE di Kabupaten Bogor diketahui beberapa wilayah peringkat teratas kecamatan dengan tingkat kemiskinan ekstrem tertinggi yang dapat dilihat pada Gambar.1.9.



Gambar 1.9. Sandingan Jumlah Populasi Penduduk terhadap Jumlah Masyarakat Miskin Ekstrem (Desil 1) basis kecamatan di Kabupaten Bogor Tahun 2024
 sumber: <https://p3ke.kemenkopmk.go.id>, (diolah Peneliti)

Melihat pada Gambar 1.9 hanya Kecamatan Sukajaya dengan total Masyarakat/Individu terkategori miskin ekstrem yang hampir mencapai 50% dari total populasi jumlah penduduk yaitu 4.901 jiwa (40,32 %).

Kecamatan Sukajaya merepresentasikan wilayah dengan tingkat kerentanan yang diperparah oleh faktor ekologi. Kecamatan ini sering kali mengalami bencana alam seperti tanah longsor, yang secara langsung berdampak pada penghancuran aset-aset ekonomi warga miskin seperti kehilangan tempat tinggal dan rumah yang tidak layak akibat bencana (Rama, 2025). Kecamatan ini juga memiliki rasio ketergantungan penduduk yang tinggi, dimana jumlah anak-anak dan lansia dalam satu rumah tangga sering kali tidak sebanding dengan pendapatan kepala keluarga (P3KE, 2024).

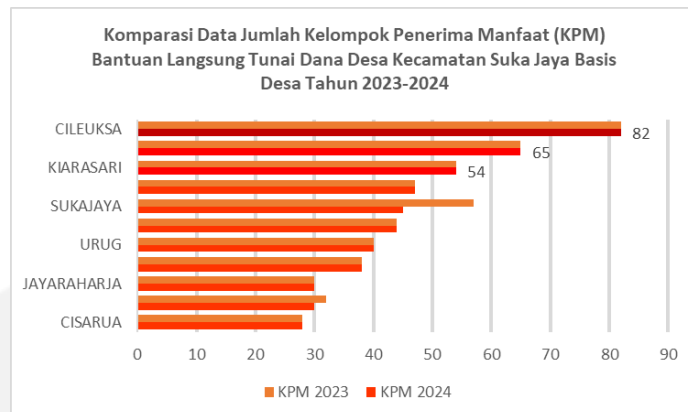
Kecamatan Sukajaya secara geografis berada pada wilayah barat Kabupaten Bogor, wilayah ini memiliki konsentrasi yang tinggi terhadap tingkat kemiskinan ekstrem. Hal tersebut dapat dijelaskan melalui beberapa faktor pendorong yang saling berikatan seperti aksesibilitas dan infrastruktur (P3KE, 2024). Secara historis, Kecamatan ini memiliki keterbatasan akses transportasi menuju pusat-pusat industri di wilayah timur dan utara. Hal ini

membatasi mobilitas penduduk untuk mencari pekerjaan formal dengan upah yang layak.

Kemudian, wilayah barat dari Kabupaten Bogor seperti Kecamatan Sukajaya sangat ketergantungan pada sektor primer seperti pertanian dan perkebunan, hal ini mengakibatkan apabila terjadi perubahan iklim seperti El-Nino atau La-Nina, penduduk di wilayah ini tidak memiliki jaring pengaman ekonomi yang memadai. Sehingga penduduk di wilayah ini cenderung terjebak dalam siklus kemiskinan yang sulit terputus tanpa intervensi eksternal yang masif.

Selain itu, wilayah-wilayah di bagian barat Kabupaten Bogor, seperti di Kecamatan Sukajaya juga termasuk dalam zona rawan bencana. Akibat dari terjadinya permasalahan tersebut menjadikan pemerintah daerah mengalihkan anggaran pembangunan menuju rehabilitasi dan rekonstruksi terhadap infrastruktur publik, sehingga memperlambat upaya pengentasan kemiskinan jangka panjang.

Dalam rangka untuk mengetahui titik lokus penyumbang kemiskinan ekstrem terbesar di Kecamatan Sukajaya, perlu diidentifikasi pada basis tingkat desa berdasarkan jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) dari program jaring pengaman sosial berupa BLT-Dana Desa dan alokasi BLT pada desa tersebut. Berikut merupakan data Jumlah KPM BLT-Dana Desa di Kecamatan Sukajaya basis Desa pada Tahun 2024 yang dapat dilihat pada Gambar 1.10.



Gambar 1.10. Komparasi Data Jumlah Kelompok Penerima Manfaat (KPM) Bantuan Langsung Tunai Dana Desa Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor Tahun 2023-2024

sumber: <https://monevdd.kemendes.go.id/> (diolah Peneliti)

Melihat pada Gambar 1.10 diatas, diketahui bahwa Desa Cileuksa, memiliki jumlah masyarakat miskin ekstrem terbanyak dengan jumlah 82 KPM di tahun 2023 dan 2024, angka jumlah KPM tersebut bersifat konstan, hal ini menandakan bahwa secara dugaan awal intervensi program jaring pengaman sosial berupa BLT-Dana Desa belum berdampak secara signifikan bagi penurunan jumlah penerima KPM. Namun, untuk memvalidasi kembali terhadap pernyataan tersebut, perlu juga kita ketahui perbandingan besaran alokasi BLT-Dana Desa pada masing-masing desa di kecamatan tersebut secara *year on years* (yoy) pada tahun terakhir.



Gambar 1.11. Komparasi Alokasi Anggaran BLT-Dana Desa di Kecamatan Sukajaya Basis Desa Tahun 2023-2024

sumber: <https://monevdd.kemendes.go.id/> (diolah Peneliti)

Melalui pada Gambar 1.11, diketahui bahwa Alokasi Anggaran BLT-Dana Desa di Desa Cileuksa merupakan yang tertinggi dari tahun 2023 hingga 2024 dan bersifat konstan tanpa perubahan, mengingat di desa tersebut juga memiliki tingkat KPM tertinggi, hal ini menjadikan sebuah paradoks di tingkat desa. Namun melalui persoalan tersebut, bukan menjadikan kita terkonsentrasi pada desa sebagai subjek yang mengalami fenomena paradoks tersebut, melainkan pada kebijakan dalam penanganan persoalannya.

Alokasi BLT-Dana Desa dan program BLT-Dana Desa perlu kiranya di evaluasi dan di tinjau kembali efektivitas serta kebermanfaatannya bagi penurunan jumlah masyarakat miskin ekstrem. Serta bagaimana melakukan re-formulasikan prioritas penggunaan Dana Desa. Bappenas (2026) dalam dokumen panduan penanggulangan kemiskinan ekstrem mengatakan bahwa, secara konteks evaluasi Dana Desa sering kali tidak diarahkan secara terintegrasi untuk mendukung prioritas nasional tersebut, melainkan terdistribusi pada program pembangunan non-prioritas akibat tekanan politik lokal. Melalui persoalan tersebut, re-formulasi prioritas penggunaan Dana Desa dapat tepat guna dan berdaya guna serta memberikan manfaat bagi masyarakat di desa untuk dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan taraf hidup.

B. Identifikasi Masalah

Berangkat dari latar belakang permasalahan, beberapa hal yang menyebabkan terjadinya kemiskinan ekstrem di khususnya di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya Kabupaten Bogor, berupa:

1. Terdapat anomali ketimpangan spasial-ekonomi dan “Paradoks Bogor” di wilayah peri-urban. Salah satunya di Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya, oleh karena cukup tingginya injeksi fiskal dari APBN melalui Dana Desa di wilayah tersebut, namun jumlah masyarakat miskin ekstrem yang terkategori sebagai KPM BLT-Dana Desa tidak mengalami graduasi secara mandiri dan jumlahnya cenderung stagnan;

2. Kerentanan ekologi-sosial dan siklus kemiskinan kronis di tingkat mikro pada Desa Cileuksa, Kecamatan Sukajaya. Angka KPM serta besaran alokasi anggaran BLT-Dana Desa tersebut terpantau konstan dan tanpa perubahan (*steady state*) selama periode tahun 2023 hingga 2024. Kondisi ini mengindikasikan adanya stagnasi program, di mana penyaluran bantuan sosial belum berdampak signifikan terhadap penurunan jumlah KPM. Pagu anggaran BLT-Dana Desa yang tinggi dan konstan ini memicu paradoks mikro, menandakan bahwa bantuan dana desa belum berhasil mendorong graduasi ekonomi mandiri bagi penerima manfaat, melainkan hanya menjadi instrumen penyambung hidup konsumtif yang melestarikan ketergantungan bantuan.

C. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan identifikasi masalah multidimensi di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini dirancang sebagai berikut:

1. Apakah adanya pengaruh dari pemberian BLT-Dana Desa terhadap kecukupan pengeluaran minimum konsumsi masyarakat miskin ekstrem yang terkategori KPM BLT-Dana Desa di Desa Cileuksa ?
2. Bagaimana implementasi pengelolaan Dana Desa di Desa Cileuksa dilihat dalam perspektif teori *content of policy* kebijakan Grindle khususnya pada aspek kepentingan yang dipengaruhi, tipe manfaat dan letak pengambilan keputusan serta dilihat berdasarkan sudut pandang kemiskinan oleh karena kondisi geografis dalam teori kebijakan Martin Ravallion?
3. Bagaimana strategi kebijakan yang efektif dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem di Desa Cileuksa?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian dirumuskan untuk menjawab setiap pertanyaan penelitian yang telah diajukan pada rumusan masalah. Berdasarkan hal tersebut, tujuan penelitian ini dispesifikasikan untuk:

1. Menganalisis pengaruh kontribusi dan kebermanfaatan pemberian BLT Dana Desa terhadap ketercukupan pengeluaran minimum konsumsi harian masyarakat miskin ekstrem yang terkategori KPM BLT-Dana Desa di Desa Cileuksa;
2. Membedah secara dua perspektif pengaruh kepentingan para aktor birokrat terkait kebijakan pemanfaatan Dana Desa bagi penanganan kemiskinan ekstrem dan tipe manfaat yang dirasakan masyarakat miskin ekstrem dengan adanya Dana Desa dan BLT-Dana Desa, kondisi spasial, ekologi dan ekonomi di wilayah Desa Cileuksa sebagai bagian dari wilayah peri-urban;
3. Menyusun sebuah strategi kebijakan berupa penentuan formulasi perhitungan pengalokasian Dana Desa yang bersumber dari APBN dengan mengadopsi formulasi perhitungan Alokasi Dana Desa (ADD) yang bersumber dari APBD Kabupaten/Kota. Hal ini sebagai bentuk evaluasi terhadap kebijakan Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal tentang Fokus Penggunaan Dana Desa.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Akademis
 - a. Dekonstruksi Teori Segitiga Kausalitas Pembangunan, Hasil kajian ini menantang asumsi makro ekonomi klasik dengan menjelaskan mengapa pertumbuhan industri manufaktur padat modal di wilayah urban gagal melakukan tetesan ke bawah (*trickle-down effect*) secara efektif ke wilayah pedesaan peri-urban yang mengalami ketimpangan tinggi;

- b. Pengembangan Teori Penentuan Lokus Martin Ravallion: melalui pembuktian empiris terhadap teori kebijakan publik Ravallion mengenai efisiensi pengentasan kemiskinan berdasarkan volume absolut penduduk miskin dibandingkan persentase relatif. Analisis ini menyajikan argumentasi ilmiah mengenai urgensi prioritas lokus di wilayah dengan populasi besar seperti Jawa Barat dalam rangka pencapaian target nasional;
- c. Penerapan dalam pendekatan paradigma administrasi publik dan penerapan dari *policy cycle* sebagai konsep studi analisis kebijakan, di dukung dengan pemahaman mengenai penerapan nyata dari evaluasi dan implementasi kebijakan: diharapkan dapat menjadi salah satu saran rujukan dalam perumusan dan penyusunan kebijakan di lingkungan pemerintah yang *holistic*, *comprehensive*, dan *collaborative*, bukan hanya terfokus pada persoalan dan permasalahan pengentasan kemiskinan, namun juga berbagai persoalan lainnya dengan melibatkan peran seluruh pihak.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemendesa PMK) dan Bappenas: Memberikan bahan evaluasi empiris mengenai efektivitas implementasi Inpres Nomor 4 Tahun 2022 di daerah, khususnya dalam menyikapi perluasan populasi sasaran pasca-pemberlakuan standar baru US\$ 2,15 PPP;
- b. Bagi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDT): Menyediakan draf rekomendasi formulasi kebijakan penggunaan Dana Desa. Rekomendasi ini dapat digunakan untuk mengubah parameter pembagian Dana Desa agar tidak hanya berdasarkan faktor administratif historis, melainkan dikaitkan secara dinamis dengan indeks kinerja graduasi mandiri KPM kemiskinan ekstrem di tingkat desa ;

- c. Bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor: Menjadi dokumen rujukan (*policy brief*) untuk memecahkan "Paradoks Bogor". Bappedalitbang dapat menggunakan rekomendasi penelitian ini untuk menyusun sinkronisasi program penanggulangan kemiskinan lintas sektoral yang memadukan pembangunan konektivitas infrastruktur;
- d. Bagi Pemerintah Kecamatan Sukajaya dan Desa Cileuksa: Memberikan instrumen panduan praktis untuk melakukan pembersihan basis data penerima bantuan (*data cleaning*) secara partisipatif demi meniadakan exclusion dan inclusion error di tingkat rukun tetangga.

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

BAB V

Penutup

A. Simpulan

Kesimpulan komprehensif pada penelitian ini merujuk pada informasi-informasi serta telaahan analisa hasil penelitian, ditujukan untuk dapat menjawab persoalan yang tertuang pada rumusan permasalahan dan untuk memenuhi tujuan penelitian, adapun hasil kesimpulan tersebut diuraikan sebagai berikut.

1. Merujuk pada analisis kuantitatif pengaruh kontribusi dan kebermanfaatan pemberian BLT Dana Desa terhadap ketercukupan pengeluaran minimum konsumsi harian masyarakat miskin ekstrem yang terkategori KPM BLT Dana Desa di Desa Cileuksa, diketahui hasil dari Model 1 menyatakan bahwa Subsidi BLT Dana Desa tidak memiliki pengaruh linier yang signifikan terhadap pengeluaran konsumsi minimum KPM Miskin Ekstrem karena hanya berkontribusi sebesar menutup 27,78% dari kebutuhan pengeluaran minimum tersebut;
2. Berdasarkan analisis perspektif berdasarkan teori *content of policy* Grindle dan *geographic poverty trap* dari Martin Ravallion, Desa Cileuksa terkategori paradoks dikarenakan tingginya injeksi fiskal dari APBN Dana Desa di wilayah tersebut, gagal menggradiasi jumlah KPM Miskin Ekstrem ditambah ketimpangan kondisi ekonomi masyarakat oleh karena kondisi spasial, ekologis serta geografis termasuk tingkat kesulitan aksesibilitas yang menjadikan wilayah tersebut menjadi wilayah terisolasi di Kabupaten Bogor;
3. Strategi kebijakan yang efektif yaitu, mensintesis dan mengevaluasi kembali regulasi Peraturan Menteri Desa PDT terkait Fokus penggunaan Dana Desa dan Peraturan menteri Keuangan Nomor 7 Tahun 2026 mengenai Pengelolaan Dana Desa dengan melibatkan perspektif akademis dan sistematis untuk mengalihkan kebijakan jaring pengaman sosial pasif (BLT) menjadi aktif (PKTDesa).

B. Saran

Saran atau Rekomendasi strategis dan usulan regulasi kebijakan masa depan antara lain:

1. Pihak pemangku kebijakan dan perumus kebijakan seyogyanya dalam merumuskan kebijakan, perlu memandang berdasarkan teori-teori kebijakan publik sebelum menggagas dan menetapkan suatu kebijakan sebagai bahan masukan analisis dan rekomendasi kebijakan;
2. Pihak pemangku kebijakan dan perumus kebijakan seyogyanya dalam menetapkan besaran nilai nominal anggaran Dana Desa perlu mempertimbangkan dari segi formulasi matematis agar memiliki dasar berkeadilan dan komprehensif dalam menetapkan besaran alokasi anggaran yang di salurkan untuk program-program bagi kesejahteraan masyarakat di samping pertimbangan politik;
3. Untuk menghentikan perangkap ketergantungan (*dependency trap*) yang melestarikan kemiskinan ekstrem di kalangan KPM Desil 1, disarankan agar skema penggunaan Dana Desa ditransformasikan secara bertahap dari pola bantuan sosial konsumtif jangka pendek menuju skema pemberdayaan ekonomi produktif yang terintegrasi (*productive cash transfer*).
 - a. Penyaluran BLT Dana Desa yang bersifat konsumtif pasif (*protection*) hanya untuk kelompok masyarakat non-produktif seperti lansia tunggal dan disabilitas berat) guna memenuhi standar kebutuhan dasar konsumsi (*consumption floor*); dan
 - b. Penduduk usia produktif Desil 1 alokasi BLT Dana Desa dialihkan dalam bentuk program PKTDesa, pelatihan vokasi terapan, bantuan modal usaha mikro.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Adji, A., Hidayat, T., Tuhiman, H., Kurniawati, S., & Maulana, A. (2020). Pengukuran garis kemiskinan di Indonesia: Tinjauan teoretis dan usulan perbaikan (Kertas Kerja TNP2K). Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan
- Alcock, P. (1997). *Understanding poverty* (J. Campling, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). Palgrave Macmillan.
- Alfirman, L., Adriyanto, Ludiro, Purwanto, Firdaus, S., Christyana, L. K., Widadi, A., Purbo, R. K., Sembiring, B. A., Hijrah, M., Ednur, R. K., Sugiyarto, A., Bestari, R. R., Saputra, A., Yusuf, A. I., Kurniawan, M. H., Pohan, M., Bramadhona, Kusmara, B. Y., & Saputro, J. (2024). Laporan perkembangan ekonomi dan fiskal daerah: Sinergi kebijakan fiskal dalam memperkuat strategi penurunan kemiskinan. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. (2025). *Relayout narasi RPJMN tahun 2025-2029* (2). Kementerian PPN/Bappenas.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Kecamatan Sukajaya dalam angka*. Badan Pusat Statistik.
- Bapperida Kota Bogor. (2024). *Laporan akhir: Kajian strategis kebijakan penurunan ketimpangan ekonomi di Kota Bogor tahun 2024*. Badan Perencanaan dan Pengembangan Riset Daerah Kota Bogor.
- Barzelay, M. (2001). *Breaking through bureaucracy: A new vision for managing in government*. University of California Press.
- Budiastuti, D., & Bandur, A. (2018). *Validitas dan reliabilitas penelitian* (Vol. 1). Mitra Wacana Media.

- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications
- Dunn, W. N. (1994). *Pengantar analisis kebijakan publik* (M. D. Darwin, Ed.; 2nd ed., Vol. 1). Gadjah Mada University Press.
- Handra, H. (2022). *Analisis kebijakan dampak dana desa terhadap kemiskinan, perekonomian, pengangguran, dan pelayanan publik periode 2015-2019*. KOMPAK.
- Kartiningrum, E. D., Basuki, H., Bambang, N., Otok, W., Nurul, E., & Yuswatiningsih, K. E. (n.d.). *Aplikasi regresi dan korelasi dalam analisis data hasil penelitian*. STIKES Majapahit Mojokerto.
- Kemenko PMK. (2024). *Laporan pelaksanaan dan evaluasi percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem 2021-2024*. Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
- Keynes, J. M. (1936). *The general theory of employment, interest, and money*. Palgrave Macmillan.
- Labovitz, S., & Hagedorn, R. (1971). *Introduction to social research*. McGraw-Hill.
- Oliver, M., & Shapiro, T. (2006). *Black wealth, white wealth: A new perspective on racial inequality* (2nd ed., Vol. 1). Routledge.
- Ravallion, M. (2003). *Targeted transfers in poor countries: Revisiting the trade-offs and policy options*. Chronic Poverty Research Centre.
- Ravallion, M. (2013). *The Idea of Antipoverty Policy*.
- Ravallion, M. (2014). *Are the world's poorest being left behind?*
- Ravallion, M. (2016). *The economics of poverty: History, measurement, and policy*. Oxford University Press.

- Ravallion, M., & Jalan, J. (1998). *Geographic poverty traps?* (Vol. 86). Boston University. <http://ageconsearch.umn.edu>
- Rosenthal, R., & Rosnow, R. L. (2008). *Essentials of behavioral research: Methods and data analysis* (3rd ed.). McGraw-Hill. <http://www.mhhe.com>
- Ruhyadi, U. (2019). *Profile Desa Cileuksa 2019*. Pemerintah Desa Cileuksa.
- Sherraden, M. (1991). *Assets and the poor: New American welfare policy* (1st ed., Vol. 1). M. E. Sharpe.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (n.d.). *Ringkasan kebijakan: Pengukuran angka kemiskinan standar vs nasional*.
- Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K). (2024). *Menanggulangi kemiskinan dan menghapus kemiskinan ekstrem: Upaya penguatan kebijakan dan program yang adaptif dan inklusif*.
- Ulum, M. (2016). *Uji validitas dan uji reliabilitas* (6th ed., Vol. 1). Institut Teknologi Kesehatan Malang Vidya Cipta Husada.
- Wahab, S. A. (2008). *Analisis kebijakan dari formulasi ke implementasi kebijakan negara* (2nd ed.). Bumi Aksara.
- Warwick, D. P., & Lininger, C. A. (1975). *The sample survey: Theory and practice*. McGraw-Hill.
- Westra, P. (1983). *Manajemen pembangunan daerah*. Ghalia Indonesia.
- Wibawa, S., Purbokusuma, Y., & Pramusinto, A. (1994). *Evaluasi kebijakan publik*. RajaGrafindo Persada

ARTIKEL JURNAL

- Ahmad, A. S. (2025). Kabupaten Bogor jadi kantong kemiskinan terbesar se-Indonesia, padahal rumah Prabowo dan SBY. Suara Bogor. <https://bogor.suara.com/read/2025/11/21/130000/kabupaten-bogor-jadi>.
- Amy, Y. S. R., & Juwono, V. (2019). Birokrasi & government: Teori, konsep, dan aplikasi. Rajawali Pers.
- Andrianto, R. (2026, April 22). Tingkat kemiskinan RI versi Bank Dunia dan BPS beda jauh. CNBC Indonesia.
- Anirwan. (2022). Implementasi kebijakan penanggulangan kemiskinan di Kota Makassar.
- Apriliyani, L., & Kholis, N. (2023). Pengaruh kompetensi, akuntabilitas, moralitas individu, terhadap pencegahan fraud dalam pengelolaan dana desa. *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen*, 1(3), 58–77. <https://doi.org/10.61722/jiem.vli3.178>
- Arfiansyah, M. (2020). Dampak dana desa dalam penanggulangan kemiskinan di Jawa Tengah. *Studi Islam dan Sosial*, 1(1), 91–106.
- Ash-Shiddiqi, H., Sinaga, R. W., & Audina, N. C. (2025). Kajian teoritis: Analisis data kualitatif (Vol. 3, No. 2).
- Azmi, S. (2020). Rural development policy and poverty alleviation: The case of village funds in Aceh Province, Indonesia [Tesis Magister, IPB University]. Repositori IPB University.
- Bjerke, M. B., & Renger, R. (2017). Being smart about writing SMART objectives. *Evaluation and Program Planning*, 61, 125–127. <https://doi.org/10.1016/j.evalprogplan.2016.12.009>

- Brown, C., Ravallion, M., & Van De Walle, D. (2016). A poor means test? Econometric targeting in Africa. World Bank Group. <http://econ.worldbank.org>
- BPS. (2025). Berita resmi statistik. Badan Pusat Statistik
- Chang, H. J. (2009). Collaborative governance in welfare service delivery: Focusing on local welfare system in Korea. *International Review of Public Administration*, 13(sup1), 75–90. <https://doi.org/10.1080/12294659.2009.10805141>
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Fadilla, A., Sinurat, G., & Jayadin. (2023). Analisis tata kelola dana desa dan alokasi dana desa, dan pengaruhnya terhadap penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Bogor. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*, 23(1), 76–84.
- Gareta, S. P. (2022). BPS: Upah buruh tani nasional pada Mei 2022 naik 0,21 persen. ANTARA News. <https://www.antaranews.com/berita/2940541/bps-upah-buruh-tani-nasional-pada-mei-2022-naik-021-persen>
- Gugah Nurani Indonesia. (2024, December 23). Komipo Energy Indonesia dan Gugah Nurani Indonesia melakukan peresmian perbaikan sekolah tanggap bencana di Desa Cileuksa. <https://gnindonesia.org/article/inauguration-of-disaster-resilient-school-renovation-in-cileuksa-village>
- Haidir, A. A., & Setyari, N. P. W. (2024). Indonesia social progress: The role of access to basic education in escaping from poverty trap. *Jurnal Ekonomi & Studi Pembangunan*, 24(2), 428–457. <https://doi.org/10.18196/jesp.v24i2.19810>

- Haris, A. M. A. (2018). Masalah kemiskinan suatu tantangan bagi profesi pekerja sosial. *Mimbar Kesejahteraan Sosial*, 1–15.
- Hasyyati, A., & Holis, A. (2025). Mencari jalan pengentasan kemiskinan.
- Husanatarina, F., Barbara, B., Agnessy, S., Amelia, V., & Widiastuti, L. (2024). Efektivitas program penanggulangan kemiskinan.
- Ibrahim, S. N. K., Hidayati, F., Rifandi, U., & Taufiqurrokhman. (2024). Evaluasi kebijakan ketahanan pangan program bantuan beras cadangan pangan pemerintah 2024. *Penelitian dan Kajian Ilmiah*, 18(1), 76-85.
- Iwansyah, Sunito, S., & Sjaf, S. (2016). Modal Jaro dalam arena politik lokal: Studi kasus di Desa Cileuksa. *Pusat Kajian Sosial dan Kebijakan Publik FOSIL INSTITUT*, 11, 1-15.
- Kasiyani, D. (2018). Trajektori hubungan negara dan masyarakat di Indonesia dalam perspektif administrasi publik. *Public of Administration*, 1-16.
- Krismasta, V., Rogi, O. H. A., & Tilaar, S. (2015). Kajian transformasi wilayah peri-urban di Kota Manado (Studi kasus: Kecamatan Mapanget). *Spasial*, 2(1), 45-56. <https://doi.org/10.35793/sp.v2i1.8260>
- Kusuma, A. I. (2024). Desa Cileuksa viral disebut Prabowo Gibran menang telak, ternyata ada wisata Bukit Teletubbies. Kompas.tv. <https://www.kompas.tv/lifestyle/497662/desa-cileuksa-viral-disebut-prabowo-gibran-menang-telak-ternyata-ada-wisata-bukit-teletubbies>
- Lestari, P. I. (2023). Kemiskinan ekstrem, ketimpangan dan pertumbuhan ekonomi di Indonesia.
- Mahardhani, A. J. (2018). Advokasi kebijakan publik (S. Mukaromah, Ed.). Calina Media.
- Minarno, P. A., Rauf, M. H., & Faturukhman, E. S. (2023). Analisis risiko bencana tanah longsor pada sektor permukiman di wilayah selatan Kabupaten Bogor.

Jurnal Manajemen Bencana (JMB), 9(1), 12-25.
<https://doi.org/10.33172/jmb.v9i1.1560>

Naryanto, H. S., Prawiradisastra, F., Ardiyanto, R., & Hidayat, W. (2020). Analisis pasca bencana tanah longsor 1 Januari 2020 dan evaluasi penataan kawasan di Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor. *Jurnal Geografi Gea*, 20(2), 112-125.

Nurhidayat, R. (2018). Pengaruh pertumbuhan belanja desa terhadap pertumbuhan pendidikan masyarakat pada Desa Babakan Sadeng Kecamatan Leuwisadeng Kabupaten Bogor periode tahun 2012-2016 [Skripsi Sarjana, Universitas Pakuan]. Repositori Universitas Pakuan.

Oktaviani, L. K., Basuki, P., & Anggara, J. (2025). Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi ketimpangan pendapatan Kabupaten/Kota Nusa Tenggara Barat tahun 2014-2023. *Jurnal Konstanta Ekonomi Pembangunan*, 4, 256-272.

Pattinama, M. J. (2009). Poverty reduction through local wisdom (A case study from Buru Island-Maluku and Surade-West Java). *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 13(1), 1–12. <https://doi.org/10.7454/mssh.v13i1.195>

Qhoirunisa, S., & Nurmalina, R. A. (2013). Farm income of hybrid rice and inbred rice in Bogor Regency, West Java Province.

Rahmah, S. Z., Wonoadi, G. L., & Zulfikar, A. (2019). The implementation of MDGs program on eradication of extreme poverty and hunger in Indonesia (2009-2014). *Politik dan Sosial Sains*, 1-14.

Rahmawati, H. (2023). Pola spasial sebaran kemiskinan di Kabupaten Pacitan dan strategi pengentasannya melalui kebijakan dana desa [Tesis Magister, Institut Pertanian Bogor]. Repositori IPB University.

Sanjaya, I. M., & Setyanto, A. R. (2026). Pengaruh tingkat urbanisasi dan upah minimum regional (UMR) terhadap aglomerasi industri manufaktur di Pulau Jawa. *Jurnal Intelek dan Cendekiawan Nusantara*, 1(1), 89-102.
<https://jicnusantara.com/index.php/jicn>.

- Setiawan, M. F. (2020). Desa sudah hancur akibat bencana longsor, ribuan warga siap direlokasi. JPNN. <https://www.jpnn.com/news/desa-sudah-hancur-akibat-bencana-longsor-ribuan-warga-siap-direlokasi>
- Sigit, T. A. (2020). Pengaruh dana desa terhadap kemiskinan: Studi tingkat kabupaten/kota di Indonesia. *Jurnal Perbendaharaan, Keuangan Negara dan Kebijakan Publik*, 5(2), 105–119.
- Sulpar, & Lestari, A. I. (2024). Evaluation of village fund management in increasing village income in Pakeng Village, Lembang District, Enrekang Regency. *Axegnal: Tax and Economic Insights Journal*, 1(1), 34-45.
- Surbakti, A., Sulaeman, N., Alamsyah, D., & Kartini, D. S. (2021). Implementation on financial assistance policy of political parties in 2015-2018. Zenodo, 313–322. <https://doi.org/10.5281/zenodo.4678908>
- Suryadi, D. (2022). Karakteristik rumah tangga miskin ekstrem di Provinsi Jawa Barat. *Jurnal Ilmiah Manajemen Publik dan Kebijakan Sosial*, 6(2), 78-91.
- Tapsin, G., & Hepsag, A. (2014). An analysis of household consumption expenditures in EA-18. *European Scientific Journal*, 10(16), 210-225.
- Wibisono, Y. (2025). Menimbang target kemiskinan ekstrem 0 persen. #OpiniNextPolicy.
- Yusniati, Murhaban, & Khaddafi. (2019). Pengaruh komponen alokasi dana desa dan produk domestik regional bruto terhadap tingkat kemiskinan kabupaten/kota di Provinsi Aceh. *Manajemen Indonesia*, 4(1), 1-27.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional Dalam Rangka Mendukung Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Serta Penyelamatan Ekonomi Nasional

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024

Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)

Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2023 tentang
Pengelolaan Dana Desa

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 108 Tahun 2024 tentang
Pengalokasian dan Desa setiap Desa, Penggunaan, dan Penyaluran Dana Desa
Tahun Anggaran 2025

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2026 tentang
Pengelolaan Dan Desa Tahun Anggaran 2026

Peraturan Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Republik Indonesia
Nomor 16 Tahun 2025 tentang Petunjuk Operasional atas Fokus Penggunaan
Dana Desa Tahun 2026

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan
Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2022 tentang Pedoman Umum
Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

POLITEKNIK
STIA LAN
J A K A R T A

Nomor : 1053/STIA.1.1/PPS.02.3 Jakarta, 26 Juni 2025
Sifat : Biasa
Lampiran : Proposal Tugas Akhir
Hal : Permohonan Ijin Penelitian
Mahasiswa Program Magister Terapan
Politeknik STIA LAN Jakarta

Yth. Ibu Rachmatia Handayani, S.T., M.T.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
di Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami informasikan, bahwa salah satu mahasiswa kami:

Nama : Muhammad Dimas Tri Raharjo
NPM : 2241021032
Jurusan : Administrasi Publik
Program Studi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik
Judul Tugas Akhir : Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Studi Kasus di Wilayah Cileuksa Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor)

akan melakukan penelitian dalam rangka penulisan Tugas Akhir (Tesis) di Instansi Ibu.

Sehubungan dengan itu, kami mohon kiranya Ibu berkenan memberi ijin dan membantu mahasiswa kami tersebut untuk mendapatkan bahan-bahan/data/informasi yang dibutuhkannya.

Demikian atas perkenan, bantuan dan kerjasama Ibu, kami ucapkan terima kasih.



Plk. Direktur,

D. Mala Sondang Silitonga, MA

Tembusan:

1. Wakil Direktur I Bidang Akademik;
2. Kajur/Sekjur Administrasi Publik;
3. Kaprodi/Sekprodi Magister Terapan;
4. Mahasiswa Ybs;
5. Pertinggal.



SURAT KETERANGAN

Nomor: 61/HMS.02.04/VI/2026

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Rachmatia Handayani, S.T., M.T.
NIP : 197306122006042009
Jabatan : Sekretaris Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan
Unit Kerja : Sekretariat Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan

dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : Muhammad Dimas Tri Raharjo
NPM : 2241021032
Jurusan : Administrasi Publik
Prodi : Administrasi Pembangunan Negara
Konsentrasi : Manajemen Kebijakan Publik

telah selesai melaksanakan penelitian Tugas Akhir (Tesis) dengan judul Tugas Akhir "*Evaluasi Pemanfaatan Dana Desa dalam Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem (Studi Kasus di Wilayah Cileuksa Kecamatan Sukajaya, Kabupaten Bogor*" di lingkungan Direktorat Fasilitas Pemanfaatan Dana Desa, Direktorat Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal RI pada tanggal 26 Juni 2025 s.d. 29 Mei 2026.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 3 Juni 2026

Sekretaris Direktorat Jenderal
Pembangunan Desa dan Perdesaan,



Rachmatia Handayani, S.T., M.T.
NIP. 19730612 200604 2 009

Tembusan:

Direktur Jenderal Pembangunan Desa dan Perdesaan (sebagai laporan)